

BAB 1 : KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

1. Jumlah tenaga SKM yang bertugas di Puskesmas

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa setiap Puskesmas sudah memiliki tenaga SKM. Jumlah SKM yang bertugas di Puskesmas saat ini adalah 50 orang yang tersebar di 22 Puskesmas yang ada di kota Padang, namun jumlahnya tidak sama di setiap Puskesmas di Kota Padang. Dari 3 Puskesmas yang diteliti didapatkan 1 Puskesmas yang jumlah SKM nya kurang dari standar minimal yang ditetapkan dalam Permenkes no.75 tahun 2014 yaitu minimal 2 orang per Puskesmas.

2. Latar Belakang Peminatan Pendidikan Tenaga SKM di Puskesmas

Latar belakang peminatan pendidikan tenaga kesehatan masyarakat yang bertugas di Puskesmas Kota Padang terdiri atas: 10% dari peminatan kesling, 40% dari peminatan AKK, 4% dari peminatan Promkes, 20% dari peminatan epidemiologi, 8% dari peminatan kesehatan reproduksi dan 18% dari peminatan gizi.

Penerimaan dan penempatan tenaga kesehatan masyarakat di Puskesmas Kota Padang tidak berdasarkan peminatan, hanya SKM secara umum sehingga mempengaruhi penerapan ilmu kesehatan masyarakat yang didapatkan pada waktu pendidikan.

3. Gambaran Kompetensi Tenaga SKM di Puskesmas

Dari hasil penelitian diketahui peran SKM di Puskesmas saat ini masih belum optimal, dikarenakan sebagian SKM hanya menempati posisi administrator kesehatan. Padahal SKM tidak semata-mata ditempatkan sebagai administrator tapi dapat juga sebagai petugas promkes, petugas surveilan epidemiologi, dan lain-lain.

Untuk melaksanakan tugas nya di Puskesmas seorang tenaga kesehatan harus memiliki kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan masyarakat yaitu: mampu untuk memenejemen sistem kesehatan masyarakat, mampu berinovasi, menganalisa, mampu melaksanakan tugas, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu untuk memimpin, serta mampu untuk mendidik dan membina masyarakat. Sebagai penguatan kompetensi SKM, setiap SKM diwajibkan memiliki STR, namun dari hasil penelitian didapatkan dari 50 orang tenaga SKM yang bertugas di puskesmas hanya 6 orang yang sudah mempunyai STR (*Surat Tanda Registrasi*) SKM.

4. Uraian Tugas Tenaga SKM di Puskesmas

Dari hasil penelitian didapatkan informasi bahwa setiap tenaga kesehatan masyarakat mempunyai uraian tugas. Bagi tenaga Kesehatan Masyarakat yang masih fungsional umum, belum bisa penyesuaian jabatan sesuai latar belakang peminatan SKMnya dan harus mengikuti pelatihan jabatan fungsional terlebih dahulu. Sehingga tidak semua uraian tugas yang diberikan mampu dilaksanakan karena ada beberapa tugas tambahan yang tidak sesuai kompetensinya sebagai tenaga kesehatan masyarakat.

5. Upaya Pengembangan Tenaga SKM di Puskesmas

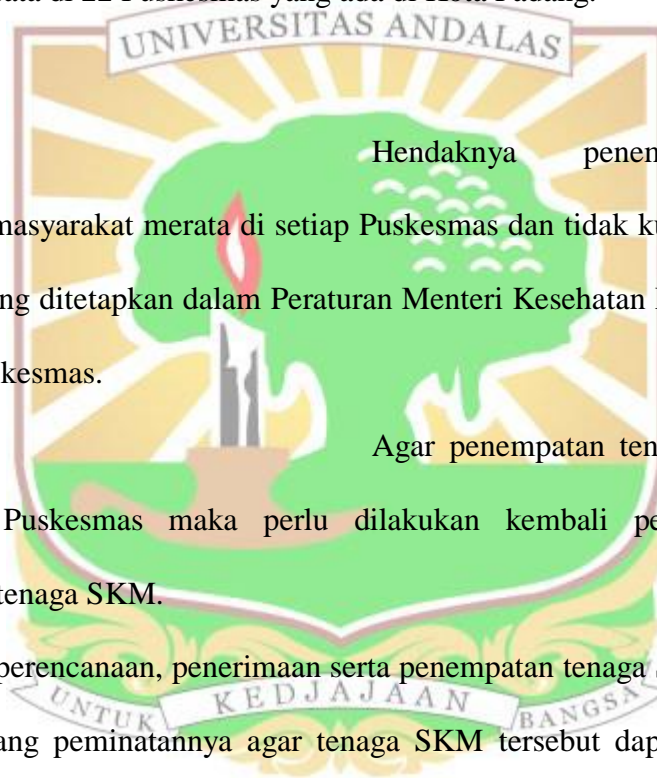
Tenaga kesehatan masyarakat di Puskesmas dapat mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar, pertemuan ilmiah dan workshop sebagai upaya pengembangan kualitas SDM. Upaya tersebut dapat diikuti melalui organisasi IAKMI, PERSAKMI maupun dari Dinas Kesehatan Kota yang di adakan setiap tahun dengan frekuensi kegiatan yang berbeda-beda. Hanya 14% tenaga kesehatan masyarakat yang bertugas di Puskesmas yang sudah mengikuti pelatihan jabatan fungsional.

1. Gambaran Pendayagunaan Tenaga SKM di Puskesmas

Pendayagunaan tenaga kesehatan masyarakat di beberapa Puskesmas saat ini belum tepat. Masalah dalam pendayagunaan tenaga kesehatan masyarakat saat ini adalah: Penempatan sebagian tenaga kesehatan masyarakat yang tidak tepat karena 54% tenaga Kesehatan Masyarakat ditempatkan sebagai tenaga administrasi atau tata usaha Puskesmas. Penerimaan tenaga kesehatan masyarakat tidak berdasarkan peminatan dan tidak sesuai kebutuhan Puskesmas, serta penempatan tenaga SKM yang belum merata di 22 Puskesmas yang ada di Kota Padang.

1.2 Saran

1. Hendaknya penempatan tenaga kesehatan masyarakat merata di setiap Puskesmas dan tidak kurang dari standar minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.75 tahun 2014 tentang Puskesmas.
2. Agar penempatan tenaga SKM merata di setiap Puskesmas maka perlu dilakukan kembali pemetaan pegawai khususnya tenaga SKM.
3. Sebaiknya perencanaan, penerimaan serta penempatan tenaga SKM berdasarkan latar belakang peminatannya agar tenaga SKM tersebut dapat optimal dalam bekerja dan untuk dapat tercapainya keberhasilan program Puskesmas.
4. Hendaknya setiap tenaga SKM sudah memiliki STR (*Surat Tanda Registrasi*).
5. Hendaknya setiap tenaga SKM lebih meningkatkan minatnya untuk mengikuti seminar, pelatihan, atau kegiatan pengembangan SDM lainnya untuk dapat terus mengembangkan ilmu serta kemampuannya dan mendapatkan informasi-informasi terbaru. Khususnya pelatihan jabatan fungsional yang penting untuk penyesuaian tugas dan jabatan di Puskesmas.



6. Hendaknya tenaga SKM yang dari latar belakang pendidikan sebelumnya adalah D3 harus menetapkan kompetensi serta fungsional sebagai SKM, tidak menetap pada profesi D3.
7. Organisasi profesi perlu duduk bersama untuk membahas masalah yang berkaitan dengan SKM ini.
8. Selanjutnya Kepala Puskesmas perlu melakukan analisa kebutuhan tenaga SKM di Puskesmasnya masing-masing karena apabila penempatannya sesuai tentu kinerjanya akan lebih optimal.
9. Hendaknya organisasi SKM dan tenaga SKM dapat memecahkan masalah penetapan fungsional SKM yang tidak linier.
10. Dinas Kesehatan atau Puskesmas hendaknya mendayagunakan tenaga SKM sesuai dengan latar belakang peminatan SKMnya.

